

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Effendie, Bachtiar, 1980, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung.

Kian Goenawan, 2009, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah dan Properti*, Yogyakarta.

Hajati, Sri dkk, 2011, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Airlangga University Press, Surabaya.

Hamzah, Andi, 2005, *Kamus Hukum*, Graha Indonesia, Jakarta.

Harsono, Budi, 2002, *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Cetakan Kelima Belas, Edisi Revisi)*, Djambatan, Jakarta.

Murad, Rusmadi, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung.

Notoatmojo, Soekidjo, 2010, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, rineka cipta, Jakarta.

Parlindungan, AP, 1986, *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung.

Perangin, Effendy 2005, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang*

Praktisi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Purnamasari, Irma Devita, 2010, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas*,

Mudah, dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan, Kaifa, Jakarta.

Syah, Mudakir Iskandar, 2019, *Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelesaian Sengketa*

Tanah, Jakarta

Supardi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2011, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yuslim, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zuhdi, Darmayati, 1993, *Panduan Penelitian Analisis Konten*, Lembaga Penelitian IKIP

Yogyakarta, Yogyakarta.

Sheilfyra Chilvass, 2022

TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH JIKA TERDAPAT BUKTI GIRIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 256/G/2019/PTUN-JKT)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan
Penjelasannya;

Undang-Undang No. 5 Tahun 1988 tentang Alat Bukti Pada Persidangan Tata
Usaha Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999
Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan
Hak Pengelolaan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.3 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Jurnal:

Annas, Maya, and Atik Winanti Taqiyah, 2020, 'Perlindungan Hukum Pemegang
Sertifikat Atas Tanah Ganda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun
1997', *Jurnal Justisia*, 5.1,
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v5i1.7272>.

Apriani, Desi, and Arifin Bur, 2021, 'Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum
Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia', *Bina Mulia Hukum*,
5 <https://doi.org/https://doi.org/10.23930/jbmh.v5i2.11>.

Hirwansyah, 2021, 'Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional
Terhadap Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda', *Hukum Sasana*, 7.1, 13–24
<https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.484>.

Hulu, Klaudius Ilkam, 2021, Sekolah Tinggi, Ilmu Hukum, Nias Selatan, and
Sertifikat Hak Milik, 'Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah
Dalam Bukti Kepemilikan Hak', *Panah Keadilan*, 1.1, 27–31,
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.29303/ius.v5i2.465>.

Johansyah, 2019, 'Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara', *Solusi*,
17.September, 336–57, <https://doi.org/10.3646/solusi.v17i.221>.

Kusuma, Dadi Arja, Rodliyah, and Sahnun, 2017 'Sertifikat Hak Milik Atas Tanah
Sebagai Alat Bukti Hak Yang Kuat', *Jurnal IuS*, 5.24, 312–21,

Sheilfyra Chilvass, 2022

**TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT HAK
ATAS TANAH JIKA TERDAPAT BUKTI GIRIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 256/G/2019/PTUN-JKT)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v5i2.465>.

Malaka, Zuman, 2017, 'Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Terhadap Terbitnya Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Kasasi MA No . 162 K / TUN / 2012)', 20.162, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.2.1-24>.

Nurkristia, Desy, 2021, 'Asas Kepastian Hukum Dalam Kedudukan Girik Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah', *Suara Hukum*, 3 No.2, 251–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jsh.v3n2.p351-273>.

P, Annisa Oktaviani, 2016, 'KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT LETTER C DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA TANAH DI PERSIDANGAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Perkara No : 816 K / Pdt / 2016)', *Verstek, Jurnal UNS*, 7.1, 41–46

Rajab, Rezeki Aldila, Bambang Eko Turisno, and Anggita Doramia Lumbanraja, 2020, 'Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah', *Notarius*, 13, 642–54, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.14710/nts.v13i2.31085>.

Susanto, Bronto, 2014, 'Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997', 10.20, <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v10i20.359>.

Wrbka, Stefan, 2016, comments on legal certainty from the perspective of European, Austrian, and Japanese private law, dalam mark fenwich and Stefan wrbka (eds),, legal certainty in a contemporary context private and criminal law perspectives, Springer, Singapore.

Website:

<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit> diakses pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 18.00 WIB.

<https://nasional.kontan.co.id/news/tahun-ini-kementerian-atr-fokus-tangani-1201-sengketa-pertanahan> diakses pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB.

[Dntlawyers.com/girik-vs-sertifikat-hak-milik-mana-lebih-kuat](https://dntlawyers.com/girik-vs-sertifikat-hak-milik-mana-lebih-kuat) diakses pada tanggal 11 Januari pukul 16.40 WIB

Sheilfyra Chilvass, 2022

TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH JIKA TERDAPAT BUKTI GIRIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 256/G/2019/PTUN-JKT)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]